

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam dan demokrasi seringkali dianggap sebagai dua hal yang tidak dapat berjalan bersama, seperti yang diungkapkan oleh Huntington (dalam Mujani, dkk, 2002, hlm. 65) yang mengklaim bahwa partisipasi politik merupakan konsep yang asing dalam masyarakat Islam. Jika ada partisipasi politik dalam masyarakat Islam, maka hal itu pasti terkait dengan kegiatan keagamaan, bukan kegiatan politik non-keagamaan. Hal ini dikarenakan dalam Islam tidak ada perbedaan antara komunitas keagamaan dan komunitas politik.

Walaupun tidak ada perbedaan antara komunitas agama dan politik, secara social terdapat perbedaan-perbedaan dalam status sosial, seringkali lebih rumit dan terkadang timpang-tindih. Namun kehidupan sosial, sering ditandai oleh berjalannya norma-norma yang membedakan antara yang tua dan yang muda, yang kaya dan yang miskin, pimpinan dan bawahan, kiai dan santri, dan seterusnya. Sistem norma itu, bekerja secara efisien. Sesuai dengan konsep perbedaan dalam status sosial, dalam konteks ini, para ulama (terutama di daerah-daerah pedesaan) mereka menerima penghormatan lebih, yang tidak dimiliki oleh elite lokal yang lain (Turmudi, 2003, hlm. 101). Sebagai pemegang otoritas keagamaan, otoritas dan kekuasaannya dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada hubungan sosial saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam dunia politik.

Pengaruh seorang kiai tentu saja begitu luas, terutama dikalangan umat Islam yang sering mengikuti langkah-langkah politiknya. Keberhasilan kiai dalam memimpin masyarakat, menjadikannya semakin tampak sebagai orang yang berpengaruh, termasuk dalam ranah politik, sehingga mampu mempengaruhi dan menggerakkan aksi atau tanggapan emosional para pengikutnya (Bisri, 2000, hlm. 85).

Dalam pemahaman ilmu politik tidak terlepas dari kekuasaan sehingga dalam berpolitik dibutuhkan penguasa yang dipercaya oleh rakyat dan untuk rakyat. Pada saat ini, tidak dipungkiri bahwa peran tokoh dalam sebuah partai sangat menentukan pemilihan konstituen dalam pemilu apalagi tokoh tersebut menjadi panutan banyak orang. Dalam suatu masyarakat peran elite agama dan elite penguasa menarik untuk di pertimbangkan di dalam pengaruh dalam kehidupan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Kelompok tersebut antara lain aparat pemerintah dan tokoh masyarakat termasuk ulama di

pesantren. Ulama sejak era pra kemerdekaan hingga saat ini banyak menyumbangkan pemikiran pembinaan bibit-bibit unggul dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya dalam lingkup Pendidikan Islam. Selain itu peran ulama pada awal kemerdekaan juga sangat terasa dalam kanvas perpolitikan Indonesia.

Mengenai ulama dan politik yang tidak lepas dari Islam dan umatnya, pada tahun 1980-an umat Islam pernah ada semacam anjuran dari para tokohnya agar tidak mencampurkan agama dengan politik terutama di Indonesia, berangkat dari hal tersebut memberikan kesan bahwa umat Islam tidak perlu berpolitik apalagi dalam masyarakat lingkungan ulama semisal di lingkungan pesantren dan karena itulah orang Islam dan para tokohnya menjadi phobia berbicara soal politik. Dari sini terkadang muncul pertanyaan yang menarik untuk diteliti, benarkah umat Islam berhenti berpolitik terutama di kalangan ulama pesantren? Dan benarkah ulama di pesantren selama ini tidak kenal politik atau tidak pernah berpolitik?

Semenjak pemilu 2014 lalu ulama di pesantren menjadi sorotan beberapa kalangan yang menjadi sasaran partai politik untuk menjadikan kendaraan politik untuk menarik simpati masyarakat luas khususnya umat Islam di pedesaan yang kental akan nilai-nilai Islami. Keberadaan Ulama di pesantren yang kadang-kadang “dimanfaatkan”.

Masalah politik adalah masalah yang kompleks, seiring berjalannya waktu dan karena itu perlu adanya pemahaman bagi masyarakat mengenai segala persoalan dan tantangan sistem politik, dari hal tersebut perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai politik agar dapat menjadi insan-insan politik yang sadar akan peranannya, mengetahui apa haknya dan mempunyai tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia.

Berbicara mengenai Ulama di pesantren tentu tidak lepas dari peran penting baik di lingkungan pesantren juga di lingkungan masyarakat maupun pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, Ulama sebagai insan yang memberikan pembelajaran nonformal juga memiliki modal yang sangat kuat untuk membina dan mengarahkan masyarakat dalam upaya peningkatan pendidikan politik. Hal tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan yang menarik untuk diteliti mengenai doktrin politik dari Ulama terhadap masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang berjudul Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan Sosial Politik di Indonesia (Eka Putra, 2016, hlm.80) dikemukakan bahwa:

Sosok ulama yang suci dan bersih dari kejahatan sosial akan dipertaruhkan ketika ingin ikut terjun ke dunia politik yang nota bene penuh dengan tipu daya dan nilai-

nilai keburukan yang selama ini diajarkan kepada manusia agar dijauhi. Tapi mendiamkan kemaksiatan juga merupakan dosa. Sebuah teori sosial mengatakan bahwa kejahiliyaan terja dibukan karena banyaknya kejahatan, akan tetapi karena orang-orang baik diam dan membiarkan. Disinilah peran ulama dan tokoh agama dibutuhkan untuk menjadi kekuatan positif antara nilai yang diperjuangkan dengan kenyataan yang jauh dari norma-norma kepatutan.

Selain itu Ulama merupakan tokoh yang mempunyai posisi yang strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi mereka itu terkait dengan kedudukannya sebagai orang terdidik dan kaya dalam masyarakat. Ulama memberikan pengetahuan Islam kepada para penduduk desa dan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional adalah sarana penting untuk melakukan transfer pengetahuan terhadap masyarakat desa tersebut. Sebagai pemimpin Islam informal, ulama adalah orang yang diyakini penduduk desa mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik. Hal ini karena ulama adalah orang suci yang dianugrahi berkah, karena tipe otoritas ini berada di luar dunia kehidupan rutin dan profan sehari-hari (Weber, 1973 hlm. 53). Sehingga ulama dipandang mempunyai kelebihan yang luar biasa yang membuat kepemimpinannya diakui secara umum. Di samping kelebihan personalnya otoritas ulama dan hubungan akrabnya dengan anggota masyarakat telah di bentuk oleh kepedulian dan otoritasnya pada kepentingan-kepentingan umat Islam.

Pada titik dimana melihat dari peran-peran ulama yang strategis di dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial politik di Indonesia, khususnya pada Masyarakat desa, Ulama juga tidak lepas perannya dari kemenangan paartai politik berbasis masa Islam di ajang pemilu di pedesaan merupakan fenomena yang tidak terlepas dari campur tangan seorang figur/tokoh agama Islam. Ulama yang notabenenya adalah tokoh agama tidak hanya berfungsi pada sosial keagamaan di masyarakat desa akan tetapi juga berperan dalam tataran politik terutama dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu kemenangan partai politik berbasis masa Islam merupakan salah satu wujud peran ulama dalam politik.

Seperti yang kita kenal bahwa Kota Tasikmalaya merupakan kota santri. Hal tersebut menunjukkan secara jelas bahwa ulama-ulama besar di jawabarat ada di kota tersebut. Begitupun dalam kemenangan partai yang berbasis masa Islam di ajang pemilu Tasikmalaya berkontribusi cukup besar, yang di karenakan Tasikmalaya memiliki masyarakat dengan kultur Islam yang sangat kuat, para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sebagian besar memiliki latarbelakang organisasi Islam yang pada dasarnya organisasi Islam memiliki jaringan yang kuat dengan Ulama.

Fauzani Nugraha, 2020

PERAN ULAMA DALAM MENUMBUHKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PEDESAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tasikmalaya merupakan sebuah kota di Jawa Barat yang dikenal dengan sebutan Kota Santri. Hal ini tidak terlepas dari mayoritas penduduknya yang beragama Islam, yakni 516.739 orang atau 83,65% dari total penduduk. Di Kota Tasikmalaya terdapat 706 Ulama, 467 Mubaligh, 1.956 Khotib, 4 Penyuluh Agama dan 200 Penyuluh Honorer. Selain itu untuk meningkatkan pendidikan agama Islam di Kota Tasikmalaya terdapat 214 Pondok Pesantren dengan 367 Ulama. Pada Tahun 2009 tercatat 19.093 santri mukim dan 29.541 santri tidak mukim (santri kalong) tersebar di berbagai pesantren yang ada di Kota Tasikmalaya. Dominasi PPP di Tasikmalaya tidak lepas dari peran ulama yang tersebar di berbagai pesantren tersebut. Tidak hanya dalam Pemilu legislatif, para Ulama juga ikut berperan dalam Pilkada, diantaranya dengan memberikan pernyataan dukungan resmi terhadap salah satu kandidat dengan menggunakan dalih agama (Nasir, 2005, hlm. 28-29).

Lebih lanjut, Nasir (2005, hlm. 29) menyatakan jumlah lembaga pendidikan pesantren, Kyai dan ulama yang cukup banyak, telah memberi warna tersendiri dalam corak kehidupan sosial masyarakat. Salah satu peran para Kyai tersebut adalah dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 12 Tahun 2009 tentang “Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Ajaran Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya”. Hal ini juga tidak terlepas dari anggota DPR yang mayoritas berasal dari partai Islam, seperti PPP, PAN, PKS, PKB, PBB, dan PBR, bahkan beberapa anggota DPRD merupakan tokoh ulama.

Secara empirik, Kota Tasikmalaya dimenangkan oleh partai politik yang memiliki garis ideologi islam. sebagaimana di lansir di laman KPUD Kabupaten Tasikmalaya pada perolehan suara pada pemilu 2014 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014¹

No	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH PINDAHAN dari Hal 1	PEROLEHAN SUARA SAH				JUMLAH SUARA SAH
			DAPIL 5	DAPIL 6	DAPIL 7	12	
1	2	8	9	10	11	12	13
1	Partai NasDem	19,450	3,097	3,866	6,657	-	33,070
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	70,259	21,249	18,030	18,688	-	128,226
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	33,967	13,435	7,749	9,484	-	64,635
4	PDI PERJUANGAN	89,067	15,498	20,917	14,586	-	140,068
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	73,658	15,326	17,538	16,823	-	123,345
6	PARTAI GERINDRA	43,172	10,611	16,630	10,116	-	80,529
7	PARTAI DEMOKRAT	36,404	11,010	11,394	11,953	-	70,761
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	43,141	17,888	17,278	5,926	-	84,233
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	107,691	21,822	29,914	29,615	-	189,042
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	7,944	3,472	2,064	4,058	-	17,538
14	PARTAI BULAN BINTANG	6,955	856	733	2,335	-	10,879
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1,642	978	943	263	-	3,826
	JUMLAH	533,350	135,242	147,056	130,504	-	946,152

JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK 946,152

Data tersebut menunjukkan bahwa partai pemenang dari pemilu legislatif di kabupaten Tasikmalaya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah perolehan suara 189,042 suara pada posisi ke dua diikuti oleh PDI Perjuangan dengan perolehan suara 140,068 suara dan pada posisi ketiga adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari perolehan suara tersebut dapat diketahui bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang memiliki garis ideologi islam sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dibalikpartisipasi politik masyarakat terindikasi bahwa terdapat peran ulama yang sangat sentral dalam menumbuhkan partisipasi politik masyarakat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Pada realitasnya di Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Tokoh ulama lebih dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat daripada Kepala Desa. Bukan hanya dalam masalah pembangunan, tetapi juga dalam keikutsertaan masyarakat dalam menentukan hak suara pada Pemilihan Umum. Sebagai contoh ketika diadakan Pemilihan Kepala Desa, suara tokoh ulama dalam menentukan siapa yang pantas dipilih menjadi Kepala Desa akan menjadi panutan oleh sebagian besar masyarakat yang menjadikan ulama sebagai pemimpin spiritual mereka. Selain itu tokoh ulama dipercaya oleh masyarakat Karangnunggal sebagai sosok yang selalu mendekati diri pada sang pencipta, dengan ini masyarakat lebih percaya bahwa tokoh ulama akan jauh dari perbuatan tercela dan menyesatkan.

Studi tentang Kyai sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, diantaranya adalah Clifford Geertz (1981) dalam “Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa” yang meneliti struktur-struktur sosial masyarakat Jawa di Mojokuto. Selain itu juga ada Hiroko Horikoshi (1987) dalam “Kyai dan Perubahan Sosial”. Horikoshi secara konsisten membedakan penggunaan istilah “Kyai” dari “ulama” karena fungsi formal yang diperankannya. Ulama lebih memerankan fungsi-fungsi administratif, sedangkan Kyai cenderung bermain pada tataran kultural.

Horikoshi (1987) menyebutkan bahwa Kyai merupakan pemimpin karismatik dalam bidang agama, dia fasih dan mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca pikiran pengikut-pengikutnya. Sifat khas seorang Kyai adalah terus terang, berani dan blak-blakan dalam bersikap dan bahkan sebagai seorang ahli dia jauh lebih unggul daripada ulama dalam menerapkan prinsip-prinsip ijtihad (mengenali ajaran-ajaran Islam secara logika). Posisi Kyai dalam masyarakat hanyalah bersifat sementara dan cepat berakhir. Pengaruh Kyai tergantung

Fauzani Nugraha, 2020

PERAN ULAMA DALAM MENUMBUHKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PEDESAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pada kualitas pribadi, kemampuan dan kedinamisannya, sehingga puteranya yang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan tidak dapat menggantikan kedudukannya.

Sementara Ulama, Horikoshi (dalam Nasir, 2005, hlm. 30) menggambarannya sebagai pejabat keagamaan (fungsionaris agama). Dia menjabat urusan agama, pada pranata keulamaan Islam, yang secara tradisional telah dilestarikan oleh keluarga kalangan menengah pedesaan yang kuat yang mengkhususkan diri dalam mencetak kader ulama dan mengambil tanggung jawab dalam menjaga ortodoksi Islam. Setiap ulama desa selalu terkait dengan mesjid tempat dia bertindak sebagai imam sembahyang dan pembawa Khotbah Jum'at. Sebagian besar ulama mengelola madrasah, tempat para penduduk desa dan santri berkumpul untuk belajar membaca Al-Quran dan mendengarkan wejangan ulama. Beberapa diantara mereka juga memiliki dan mengurus pesantrennya sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya penulis melihat begitu kompleksnya peran Ulama dalam kehidupan politik di desa, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian yang mengambil judul tentang **“Peran Ulama dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik di Pedesaan”**. Maka penulis memfokuskan penelitian pada peranan Ulama dalam kehidupan berpolitik masyarakat di Desa Karangnunggal.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana Peran Ulama dalam menumbuhkan Partisipasi Politik di Pedesaan?”

Berdasarkan masalah pokok tersebut, untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulis menjabarkan masalah pokok ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peranan ulama dalam partisipasi politik masyarakat di Desa Karangnunggal?
- 2) Faktor apa saja yang mengakibatkan ulama memiliki peranan dalam menumbuhkan partisipasi politik masyarakat di Desa Karangnunggal?
- 3) Bagaimana hasil yang dicapai dari adanya peranan ulama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Karangnunggal?
- 4) Apa saja kendala dan bagaimana upaya yang dilakukan ulama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Karangnunggal?

1.3 Tujuan Penelitian

Fauzani Nugraha, 2020

PERAN ULAMA DALAM MENUMBUHKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PEDESAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini secara umum untuk menganalisis peran ulama dalam menumbuhkan partisipasi politik di pedesaan. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui peranan ulama dalam partisipasi politik masyarakat di Desa Karangnunggal
- 2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang mengakibatkan ulama memiliki peranan dalam menumbuhkan partisipasi politik masyarakat di Desa Karangnunggal
- 3) Untuk mengetahui hasil yang dicapai dari peranan ulama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Karangnunggal
- 4) Untuk mengetahui kendala serta upaya yang dilakukan ulama dalam meningkatkan partisipasi politik di pedesaan khususnya di Desa Karangnunggal

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini ialah:

- 1) Dari Segi Teori
Memberikan informasi tentang sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan partisipasi politik di pedesaan khususnya di Desa Karangnunggal.
- 2) Dari Segi Kebijakan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi baru mengenai peran ulama dalam menumbuhkan partisipasi politik di pedesaan khususnya di Desa Karangnunggal.
- 3) Dari Segi Praktik
Memberikan sudut pandang baru bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya dalam memberikan pandangan mengenai peranan ulama dalam meningkatkan partisipasi politik di pedesaan khususnya di Desa Karangnunggal.
- 4) Dari Segi Isu serta Aksi Sosial
Memberikan pandangan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan politik dapat melalui peran ulama dalam menumbuhkan partisipasi politik di pedesaan khususnya di Desa Karangnunggal.

1.5 Struktur Organisasi

BAB 1 PENDAHULUAN

Fauzani Nugraha, 2020

PERAN ULAMA DALAM MENUMBUHKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PEDESAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian mengenai peran ulama dan teori-teori mengenai partisipasi politik.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan mengenai metodologi penelitian, pendekatan penelitian, desain/strategi penelitian, partisipan dan tempat penelitian, prosedur-prosedur pengumpulan data, prosedur-prosedur analisis data, yang digunakan dalam penelitian mengenai Peran Ulama Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Pedesaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini peneliti menganalisis hasil temuan data tentang Peran Ulama Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Pedesaan, bagaimana peranan ulama dalam partisipasi politik masyarakat di Desa Karangnunggal, faktor apa saja yang mengakibatkan ulama memiliki peranan dalam menumbuhkan partisipasi politik masyarakat di Desa Karangnunggal, apa saja bentuk peranan ulama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Karangnunggal, apa saja kendala dan bagaimana upaya yang dilakukan ulama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Karangnunggal.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran, dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.